



Kehadiran Gereja bagi Kaum Marginal dalam Realitas Ketidakadilan Sosial

Esra Alfred Soru^{a, 1*}, Jefrit Johannes Messakh^{b, 2}

^a Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Indonesia

^b Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta, Indonesia

¹ esra.alfred@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 23 Juni 2025;
Revised: 10 Juli 2025;
Accepted: 19 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Gereja;
 Kaum Marginal;
 Ketidakadilan Sosial.

Keywords:

Church;
 Marginalized Communities;
 Social Injustice.

ABSTRAK

Ketidakadilan sosial di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang ditandai oleh kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta keterbatasan akses kelompok marginal terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Dalam konteks ini, gereja sebagai komunitas iman memiliki tanggung jawab teologis dan sosial untuk menghadirkan nilai keadilan serta pembelaan bagi kaum tertindas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kehadiran gereja, menafsirkan makna teologis keterlibatannya, dan mengevaluasi efektivitas perannya dalam merespons ketidakadilan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis deskriptif-kritis terhadap literatur teologi sosial, dokumen gerejawi, dan data sosial kemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian gereja masih menekankan pelayanan diakonia karitatif yang bersifat jangka pendek. Namun, sejumlah gereja mulai mengembangkan pelayanan transformatif melalui pemberdayaan ekonomi, advokasi sosial, dan pendidikan berbasis keadilan. Kehadiran gereja yang efektif ditandai oleh integrasi spiritualitas, aksi sosial, dan komitmen profetis terhadap perubahan struktur yang tidak adil, sehingga diperlukan pergeseran paradigma menuju praksis gereja yang kontekstual dan transformatif.

ABSTRACT

***The Presence of the Church for the Marginalized in the Reality of Social Injustice.** Social injustice in Indonesia remains a structural problem characterized by poverty, unequal income distribution, and limited access of marginalized groups to education, healthcare, and decent employment. In this context, the church, as a community of faith, carries both theological and social responsibilities to embody justice and advocate for the oppressed. This study aims to analyze the forms of the church's presence, interpret the theological meaning of its engagement, and evaluate the effectiveness of its role in responding to social injustice. The research employs a qualitative approach through a literature study using descriptive-critical analysis of social theology literature, ecclesiastical documents, and socio-cultural data in Indonesia. The findings indicate that many churches still emphasize charitable diaconal services with short-term impacts. However, some churches have begun to develop transformative ministries through economic empowerment, social advocacy, and justice-oriented education. An effective church presence is marked by the integration of spirituality, social action, and prophetic commitment to transforming unjust structures, highlighting the need for a paradigm shift toward contextual and transformative ecclesial praxis.*

Copyright © 2025 (Esra Alfred Soru & Jefrit Johannes Messakh). All Right Reserved

How to Cite : Soru , E. A., & Messakh, J. (2025). Kehadiran Gereja bagi Kaum Marginal dalam Realitas Ketidakadilan Sosial. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 5(7), 318–332. <https://doi.org/10.56393/intheos.v5i7.4199>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Ketidakadilan sosial masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, realitas menunjukkan bahwa kesenjangan sosial tetap tinggi. Data resmi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 masih berada pada angka sekitar 9,36 persen dari total populasi, atau lebih dari 25 juta jiwa hidup dalam kondisi miskin (BPS, 2023). Selain itu, nilai Gini Ratio Indonesia sebesar 0,38 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang masih signifikan. (Jakarta: BPS, 2023). Data ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketidakadilan sosial tidak hanya tampak dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, serta perlindungan hukum. Laporan dari World Bank menegaskan bahwa kelompok masyarakat miskin di Indonesia menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan kerja yang berkualitas, sehingga mobilitas sosial mereka terhambat (World Bank, Indonesia Economic Prospects Report, 2022-2023) Sementara itu, laporan Oxfam menyoroti ketimpangan kekayaan di Indonesia, di mana sebagian kecil elite ekonomi menguasai sebagian besar aset nasional, sementara masyarakat miskin tetap berada dalam kondisi rentan (Oxfam Report on Inequality in Indonesia, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial bersifat struktural dan sistemik. (Oxfam International 2021).

Ketidakadilan sosial di Indonesia secara konkret termanifestasi dalam kemiskinan struktural, ketimpangan distribusi sumber daya, dan marginalisasi kelompok rentan yang terus berlangsung hingga saat ini. Dinar & Devi, menjelaskan dalam kontes Indonesia bahwa, sebagian masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan, serta pekerjaan formal yang stabil, sehingga mendorong mereka bertahan dalam sektor informal dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. (Ningrum & Yanti, 2024). Sedangkan dari aspek gereja memandang dan menjumpai jemaat yang hidup dalam kemiskinan struktural, seperti keluarga yang bekerja di sektor informal tanpa jaminan pendapatan tetap, anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi yang tidak stabil, bahkan akses pendidikan dan kesehatan yang sangat minim. Beatus dan Alexander memberikan salah satu contoh permasalahan muncul di daerah Papua melalui kajiannya tentang kesehatan, menunjukkan bahwa masyarakat Papua masih minim pelayanan kesehatan. (Tambaip & Tjilen, 2023). Contoh lainnya, seperti akses pendidikan, keluarga yang tidak mampu bahkan keterbatasan akses yang masih sangat minim di daerah-daerah terpencil. (Toding & Harisantoso, 2023). Melihat fenomena ini kehadiran gereja seharusnya memberikan respon sebagai salah satu lembaga yang berperan untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang ada. Namun dalam praktiknya, gereja lokal sering kali merespons kondisi ini melalui pendekatan karitatif seperti bantuan sosial, namun belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan struktural, seperti ketidakadilan sistemik dan marginalisasi sosial yang dialami perempuan, pekerja informal, dan kelompok rentan lainnya. (Rahmawati & Rahmawati, 2025). Selain itu, keterbatasan kapasitas institusional serta kurangnya integrasi antara refleksi teologis dan aksi sosial gereja menyebabkan respon yang diberikan belum bersifat transformatif dan berkelanjutan, sehingga realitas ketidakadilan sosial tetap berlangsung di tengah kehidupan jemaat. Dengan demikian, konteks gereja lokal menunjukkan adanya kesenjangan antara panggilan teologis gereja dan praksis nyata dalam merespons persoalan marginalisasi, yang sekaligus menegaskan urgensi kajian mengenai kehadiran gereja yang lebih kontekstual dan transformatif.

Kaum marginal seperti masyarakat miskin perkotaan, pekerja sektor informal, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok minoritas kerap mengalami diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya sosial. Data dari BPS menunjukkan bahwa pekerja sektor informal di Indonesia masih mendominasi pasar kerja dengan persentase lebih dari 55 persen, yang berarti sebagian besar pekerja tidak memiliki jaminan sosial dan perlindungan kerja yang memadai. Realitas ini menegaskan bahwa ketidakadilan sosial bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan sistem yang

mebutuhkan respons kolektif dari berbagai pihak. (Badan Pusat Statistik, 2024) Dalam hal ini, gereja sebagai komunitas iman memiliki tanggung jawab moral dan teologis untuk menghadirkan keadilan sosial. Tradisi biblika memperlihatkan bahwa iman Kristen tidak terpisah dari kepedulian terhadap kaum miskin dan tertindas. Namun dalam praktiknya, tidak semua gereja secara aktif terlibat dalam advokasi sosial atau pemberdayaan kaum marginal. Banyak gereja masih terfokus pada pelayanan liturgis dan spiritualitas personal sehingga peran sosialnya belum optimal dalam merespons ketidakadilan struktural yang nyata di tengah masyarakat. (Toding & Harisantoso, 2023) Permasalahan utama yang muncul adalah sejauh mana gereja benar-benar hadir bagi kaum marginal dalam realitas ketidakadilan sosial di Indonesia. Apakah kehadiran tersebut hanya bersifat karitatif melalui bantuan sesaat, atau telah berkembang menuju pemberdayaan yang berkelanjutan dan transformasi sosial. Selain itu, bagaimana gereja memaknai panggilan profetisnya dalam masyarakat majemuk dan pluralistik juga menjadi pertanyaan penting. Ketidaktegasan gereja dalam menghadapi ketidakadilan sosial berpotensi membuat gereja kehilangan relevansi sosial dan kesaksian publiknya.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini menunjukkan pentingnya peran gereja dalam merespons ketidakadilan sosial. Pertama, penelitian oleh John Philip Sele dan Cynthia Wanjiku (2024) berjudul *Theology of Development Addressing Poverty and Inequality in Nigeria and Kenya* menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus pada gereja di Nigeria dan Kenya. Penelitian tersebut menemukan bahwa gereja memiliki kontribusi signifikan dalam pengurangan kemiskinan melalui pelayanan pendidikan, diakonia sosial, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. (Sele & Wanjiku, 2024) Kedua, penelitian oleh Aizaiah G. Yong (2024) berjudul *Good News for the Oppressed Exploring the Spiritual Political and Intercultural Dimensions of Howard Thurman's Philosophy* menggunakan metode studi pustaka dalam kerangka teologi praktis dan menunjukkan bahwa spiritualitas Kristen memiliki dimensi pembebasan sosial yang mendorong gereja terlibat dalam perjuangan keadilan bagi kelompok tertindas. (Yong, 2024) Ketiga, penelitian dalam *International Journal of Theology and Religious Studies* (2024) berjudul *Role of Christianity in Community Transformation* menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologi pembangunan berbasis komunitas dan menemukan bahwa gereja dapat menjadi agen transformasi sosial melalui pelayanan holistik seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Jumbe, 2024)

Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, fokusnya masih terbatas pada konteks Afrika atau refleksi teologis yang bersifat umum, sehingga belum secara khusus menyoroti kehadiran gereja dalam realitas ketidakadilan sosial di Indonesia yang ditunjukkan oleh data sosial dari Badan Pusat Statistik serta analisis kesenjangan ekonomi dari *World Bank* dan *Oxfam*. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis kehadiran gereja bagi kaum marginal dalam konteks ketidakadilan sosial di Indonesia, dengan tujuan memberikan kontribusi teologis dan praktis yang lebih kontekstual dan relevan bagi pelayanan gereja masa kini. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, makna, dan efektivitas kehadiran gereja bagi kaum marginal dalam realitas ketidakadilan sosial. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teologis dan praktis bagi gereja dalam mengembangkan pelayanan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif, kontekstual, dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis deskriptif-kritis untuk mengkaji kehadiran gereja bagi kaum marginal dalam realitas ketidakadilan sosial di Indonesia, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian teologi sosial yang menekankan analisis dokumen dan interpretasi kontekstual. (Creswell & Poth., 2007) Literatur yang digunakan dipilih secara selektif berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) karya yang secara eksplisit membahas teologi sosial, keadilan sosial, kemiskinan, atau pelayanan gereja terhadap kaum

marginal; (2) artikel yang diterbitkan dalam jurnal teologi atau studi agama yang relevan dengan konteks Indonesia; (3) literatur yang menggunakan pendekatan teologi kontekstual atau teologi praktis; serta (4) dokumen gerejawi yang berkaitan dengan praktik pelayanan sosial gereja. Untuk menjamin representativitas data dan menghindari bias pada satu tradisi gereja tertentu, penelitian ini menggunakan sumber literatur yang berasal dari berbagai latar denominasi gereja di Indonesia, seperti gereja Protestan arus utama, gereja Injili, gereja Pentakosta/karismatik, serta kajian teologi kontekstual Indonesia secara umum. (Nainggolan, 2019) Data kontekstual mengenai ketidakadilan sosial diperoleh dari laporan resmi seperti Profil Kemiskinan di Indonesia (BPS) serta laporan ketimpangan dari lembaga internasional, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi teologis kontekstual, dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk dan makna kehadiran gereja bagi kaum marginal dalam konteks Indonesia.

Hasil dan pembahasan

Diskusi secara literatur teologi sosial maupun analisis kritis tentang peran gereja di Indonesia, yang menjadi fokus analisis dimana persoalan kehadiran gereja bagi kaum marginal dalam realitas ketidakadilan sosial. Analisis ini di dasarkan pada sejumlah analisis literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa persoalan utama yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, namun berkaitan dengan bagaimana gereja memahami ketidakadilan sosial sebagai persoalan secara teologis dan secara moral. Oleh karena itu, penelitian ini memetakan masalah ke dalam beberapa arah utama, yaitu: *pertama*, bentuk ketidakadilan sosial yang secara nyata dilihat gereja dalam kehidupan jemaat dan masyarakat; *kedua*, bentuk respons gereja terhadap kaum marginal yang selama ini dilakukan; *ketiga*, kritik teologis terhadap pelayanan gereja yang masih bersifat karitatif; dan keempat, kebutuhan akan model kehadiran gereja yang lebih kontekstual dan transformatif. Dengan demikian analisis hasil ini tidak hanya mendeskripsikan data secara umum, tetapi menunjukkan arah yang jelas mengenai persoalan apa yang sedang diteliti, bagaimana data dikategorikan, dan bagaimana temuan tersebut akan menjadi dasar bagi pembahasan teologis selanjutnya.

Tabel 1. Analisis literatur dan pemetaan

1	Permasalahan Sosial yang diamati oleh Gereja	Data berdasarkan Literatur	Temuan Utama
2	Kemiskinan struktural dalam kehidupan jemaat	Sitomurus & Sitangga (2025)	Gereja melihat kemiskinan bukan hanya kurangnya ekonomi, tetapi akibat ketimpangan sosial yang terus terjadi
	Pelayanan gereja masih bersifat karitatif	Sibarani & Sahidi (2024)	Banyak gereja masih fokus pada bantuan sosial, belum pada perubahan sosial yang berkelanjutan
3	Ketimpangan sosial yang terlihat langsung oleh gereja	Sibarani (2025), Zelukhu (2023)	Gereja menyaksikan langsung ketidakadilan dalam masyarakat, terutama terhadap kaum miskin dan kelompok rentan
4	Kaum marginal belum menjadi fokus utama pelayanan gereja	Karua & Amba (2026); Siregar & Siagian (2025)	Ketidakadilan sosial tidak hanya dilihat sebagai masalah sosial, tetapi juga masalah iman dan tanggung jawab teologis

5	Gereja sebagai keadilan sosial	Siregar & Siagian (2025); Sabari & Sahidi (2025); Zalukhu (2025)	Gereja dipahami sebagai lembaga moral yang harus menyuarkan keadilan sosial di masyarakat
6	Ketidakadilan sosial sebagai persoalan teologis	Sabari & Sahidi (2025); Karua & Amba (2026)	Ketidakadilan sosial tidak hanya dilihat sebagai masalah sosial, tetapi juga masalah iman dan tanggung jawab teologis
7	Perlunya model kehadiran gereja yang kontekstual	Zalukhu (2025); Yolanka (2025)	Gereja perlu menghadirkan pelayanan yang sesuai dengan realitas sosial Indonesia saat ini

Realitas ketidakadilan sosial di Indonesia merupakan persoalan struktural yang kompleks dan multidimensional, mencakup kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dominasi pekerja informal, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat tertentu, tetapi juga menyangkut sistem distribusi sumber daya, kebijakan publik, dan dinamika sosial yang membentuk peluang hidup masyarakat. Data empiris dari Badan Pusat Statistik, World Bank, dan Oxfam menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam satu dekade terakhir, distribusi kesejahteraan belum merata. Kelompok masyarakat marginal masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas, layanan kesehatan memadai, pekerjaan layak, serta perlindungan sosial. Dengan demikian, ketidakadilan sosial di Indonesia harus dipahami bukan sekadar masalah individu, tetapi persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan sistemik.

Kemiskinan di Indonesia menunjukkan karakter struktural karena berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan, modal, pendidikan, dan jaringan ekonomi. Data BPS tahun 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan nasional berada di kisaran 9-10 persen, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah pedesaan dan kawasan timur Indonesia. Walaupun angka tersebut menurun dibandingkan dekade sebelumnya, kemiskinan ekstrem masih dialami oleh kelompok masyarakat tertentu seperti buruh informal, petani kecil, nelayan tradisional, dan masyarakat adat. (“Badan Pusat Statistik, Maret 2024,” 2024) Laporan World Bank dalam Indonesia Economic Prospects 2023-2024 menegaskan bahwa mobilitas sosial di Indonesia relatif lambat, sehingga keluarga miskin cenderung mewariskan kondisi kemiskinan kepada generasi berikutnya. Keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan layak, dan modal usaha membuat masyarakat miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. (Badan Pusat Statistik, Agustus 2023). Urbanisasi juga memperparah kondisi ini, karena banyak penduduk desa bermigrasi ke kota tetapi hanya memperoleh pekerjaan informal dengan penghasilan rendah tanpa jaminan sosial.

Ketimpangan ekonomi merupakan indikator utama ketidakadilan sosial. Rasio gini Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 0,38-0,40, yang menunjukkan kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin masih cukup besar. (Gini Ratio Indonesia 2020-2024). Laporan Oxfam mengenai ketimpangan di Indonesia menyoroti bahwa sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai porsi kekayaan nasional yang sangat besar, sementara jutaan warga hidup dalam kondisi rentan. Struktur ekonomi yang lebih menguntungkan sektor industri besar dan perusahaan korporasi dibandingkan usaha mikro dan pertanian tradisional memperlebar kesenjangan tersebut. World Bank juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya inklusif karena terkonsentrasi pada sektor tertentu seperti pertambangan, jasa keuangan, dan teknologi, sementara sektor informal dan pertanian rakyat tertinggal. (Badan Statistik, 2023, n.d.) Ketimpangan

regional memperparah situasi, di mana pembangunan dan investasi lebih terpusat di Jawa dan Bali dibandingkan Papua, NTT, dan Maluku, sehingga kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja di wilayah timur masih tertinggal.

Dominasi pekerja informal merupakan ciri penting ketidakadilan sosial di Indonesia. Data BPS menunjukkan lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal. Mereka bekerja sebagai pedagang kecil, buruh harian, pengemudi ojek, petani kecil, atau pekerja rumah tangga tanpa kontrak kerja dan perlindungan sosial. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja. Banyak pekerja informal tidak memiliki akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan pensiun, atau perlindungan kecelakaan kerja. Ketika terjadi krisis ekonomi atau pandemi, kelompok ini menjadi yang paling rentan kehilangan penghasilan. (Gini Ratio Indonesia 2020–2024). World Bank mencatat bahwa produktivitas sektor informal jauh lebih rendah dibanding sektor formal karena keterbatasan akses terhadap teknologi, pelatihan, dan modal usaha. Selain itu, perempuan sering terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah, menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial juga memiliki dimensi gender. (Bank, 2024)

Keterbatasan akses pendidikan memperkuat ketidakadilan sosial karena pendidikan merupakan kunci mobilitas sosial. Data BPS menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah menurun pada jenjang SMA di daerah miskin dan pedesaan, karena banyak anak harus bekerja membantu keluarga. Kualitas pendidikan juga berbeda antara kota dan desa. Sekolah di daerah terpencil sering kekurangan guru, fasilitas, dan teknologi. (Bank, 2024) World Bank menegaskan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dalam penilaian internasional seperti PISA, menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya saing masyarakat miskin. Biaya pendidikan tidak langsung seperti transportasi dan perlengkapan sekolah juga menjadi beban keluarga miskin, sehingga banyak anak putus sekolah dan memperkuat lingkaran kemiskinan.

Keterbatasan akses kesehatan juga menunjukkan ketidakadilan sosial yang nyata. Meskipun pemerintah mengembangkan program Jaminan Kesehatan Nasional, kesenjangan layanan kesehatan antara kota dan desa masih besar. Daerah terpencil kekurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Data nasional menunjukkan angka stunting masih berada di sekitar 20 persen dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan masalah gizi kronis pada anak-anak dari keluarga miskin. (“Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023.) Stunting berdampak pada kecerdasan dan produktivitas generasi mendatang. World Bank juga menyoroti bahwa kesehatan ibu dan anak masih menjadi tantangan karena angka kematian ibu melahirkan relatif tinggi dibanding negara dengan tingkat pendapatan serupa. Selain itu, biaya kesehatan yang tinggi sering menyebabkan keluarga jatuh miskin karena harus menjual aset atau berutang untuk pengobatan. (Hasil survei Indonesia., 2023)

Ketidakadilan sosial berdampak langsung pada kaum marginal dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka mengalami keterbatasan ekonomi, pendidikan rendah, kesehatan buruk, serta minim partisipasi dalam pembangunan. Ketimpangan sosial juga berpotensi memicu konflik sosial dan ketidakstabilan masyarakat. Oxfam menegaskan bahwa ketimpangan ekstrem dapat merusak kohesi sosial dan demokrasi, karena kelompok kaya memiliki pengaruh politik lebih besar sehingga kebijakan publik cenderung menguntungkan mereka. Akibatnya, kelompok miskin semakin terpinggirkan. Ketidakadilan sosial juga berdampak pada kondisi psikologis dan spiritual masyarakat, karena kaum marginal sering kehilangan harapan dan merasa tidak dihargai.

Bentuk Kehadiran Gereja bagi Kaum Marginal. Kehadiran gereja bagi kaum marginal merupakan salah satu indikator penting relevansi gereja dalam konteks sosial modern. Gereja sebagai komunitas iman tidak hanya dipanggil untuk menjalankan fungsi liturgis dan pastoral internal, tetapi juga untuk menghadirkan kasih dan keadilan Allah dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi

mereka yang mengalami ketidakadilan sosial. Dalam praktiknya, kehadiran gereja bagi kaum marginal dapat dilihat melalui empat bentuk utama pelayanan, yaitu pelayanan karitatif, pemberdayaan ekonomi, pendidikan sosial, dan advokasi keadilan. Keempat bentuk pelayanan ini memiliki karakteristik, kekuatan, dan keterbatasan masing-masing yang perlu dianalisis secara kritis agar gereja mampu mengembangkan pelayanan yang lebih transformatif.

Pelayanan karitatif merupakan bentuk kehadiran gereja yang paling umum ditemukan dalam praktik pastoral. Pelayanan ini biasanya berupa pembagian bantuan sembako, beasiswa, bantuan kesehatan, bantuan bencana, serta kegiatan sosial lainnya yang bertujuan meringankan penderitaan masyarakat miskin. Secara teologis, pelayanan karitatif berakar pada konsep diakonia dalam Alkitab, yaitu pelayanan kasih kepada sesama sebagai wujud iman. Banyak gereja di Indonesia dan dunia menjalankan pelayanan ini sebagai respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian dalam *Journal of Practical Theology* menunjukkan bahwa pelayanan karitatif gereja memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan jangka pendek masyarakat miskin, terutama dalam situasi krisis ekonomi atau bencana alam. (Wells, 2022) Studi lain dalam *International Journal of Public Theology* menegaskan bahwa pelayanan karitatif gereja berperan penting dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap gereja sebagai lembaga moral. (Koopman, 2020)

Namun demikian, pelayanan karitatif memiliki keterbatasan karena sering bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar masalah kemiskinan. Bantuan sosial tanpa pemberdayaan dapat menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap gereja. Oleh karena itu, banyak teolog sosial menekankan pentingnya pergeseran dari pelayanan karitatif menuju pelayanan transformatif. Laporan teologis dari *World Council of Churches* menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk mengatasi penyebab struktural kemiskinan, bukan hanya memberikan bantuan sementara. *World Council of Churches, Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes* (2013). Dalam konteks ini, pelayanan karitatif tetap penting sebagai respon awal, tetapi harus diintegrasikan dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Bentuk kedua kehadiran gereja adalah pemberdayaan ekonomi jemaat dan masyarakat. Pelayanan ini mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, koperasi gereja, pendidikan keuangan, serta bantuan modal usaha kecil. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya bantuan, tetapi oleh keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi. Penelitian dalam *Missiology: An International Review* menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi gereja mampu meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat lokal. (B. Myers, 2020) Program koperasi gereja di beberapa negara berkembang juga terbukti membantu masyarakat keluar dari jerat rentenir dan meningkatkan kesejahteraan komunitas.

Dalam konteks Indonesia, gereja yang mengembangkan pemberdayaan ekonomi jemaat melalui pelatihan keterampilan, usaha mikro, dan pendidikan kewirausahaan menunjukkan hasil yang lebih berkelanjutan dibanding pelayanan karitatif semata. Studi dalam *Studies in World Christianity* menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis gereja dapat meningkatkan martabat masyarakat marginal karena mereka tidak hanya menerima bantuan, tetapi diberdayakan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri. (B. Myers, 2020) Namun demikian, program pemberdayaan juga memiliki tantangan, seperti keterbatasan sumber daya gereja, kurangnya tenaga profesional, serta minimnya jaringan pasar bagi produk usaha jemaat. Tanpa perencanaan matang, program pemberdayaan dapat berhenti di tengah jalan.

Bentuk ketiga adalah pendidikan sosial dan kesadaran keadilan. Gereja memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran moral masyarakat melalui khotbah, seminar, pelatihan, dan pendidikan teologi kontekstual. Pendidikan sosial bertujuan menumbuhkan pemahaman jemaat tentang kemiskinan struktural, ketidakadilan gender, diskriminasi sosial, serta tanggung jawab iman dalam kehidupan publik. Penelitian dalam *Journal of Religious Education* menunjukkan bahwa pendidikan sosial dalam

gereja mampu meningkatkan kepedulian jemaat terhadap isu kemiskinan dan mendorong partisipasi dalam pelayanan masyarakat. (Durka, 2020) Pendidikan sosial juga membantu gereja memahami konteks masyarakat plural dan memperkuat dialog antaragama dalam memperjuangkan keadilan.

Namun pendidikan sosial sering belum menjadi prioritas gereja karena fokus pelayanan masih pada kegiatan internal. Banyak gereja belum memasukkan teologi sosial dalam kurikulum pengajaran jemaat. Laporan dari *Lausanne Movement* menekankan pentingnya integrasi antara penginjilan dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari misi gereja yang utuh. (“Lausanne Movement, The Cape Town Commitment,” 2011) Tanpa pendidikan sosial, gereja sulit mengembangkan pelayanan transformatif karena jemaat tidak memahami akar masalah ketidakadilan.

Bentuk keempat adalah advokasi dan pendampingan sosial. Gereja dapat berperan sebagai suara profetis yang membela kaum marginal melalui advokasi kebijakan publik, pendampingan korban ketidakadilan, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Advokasi gereja penting karena banyak masalah ketidakadilan bersifat struktural, seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial, dan eksploitasi tenaga kerja. Penelitian dalam *Journal of Church and State* menunjukkan bahwa gereja yang terlibat dalam advokasi sosial mampu mempengaruhi kebijakan publik dalam isu pendidikan, kesehatan, dan hak pekerja. (Jr., 2020) Gereja juga dapat bekerja sama dengan LSM dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun advokasi sosial memiliki tantangan karena gereja sering dianggap masuk ke wilayah politik. Sebagian gereja takut kehilangan jemaat atau menghadapi tekanan sosial. Selain itu, tidak semua gereja memiliki kapasitas untuk melakukan advokasi secara profesional. Laporan dari *Caritas Internationalis* menunjukkan bahwa advokasi gereja memerlukan jaringan luas, pelatihan kepemimpinan, dan strategi komunikasi yang matang. *Caritas Internationalis, Advocacy and Social Justice Handbook*” (2019). Tanpa persiapan, advokasi dapat menjadi simbolis tanpa dampak nyata.

Evaluasi terhadap empat bentuk kehadiran gereja menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasan. Pelayanan karitatif cepat membantu masyarakat, tetapi bersifat sementara. Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, tetapi membutuhkan sumber daya besar. Pendidikan sosial membentuk kesadaran jemaat, tetapi sering diabaikan. Advokasi sosial menyentuh akar masalah, tetapi memerlukan keberanian dan kompetensi. Oleh karena itu, gereja perlu mengintegrasikan keempat bentuk pelayanan tersebut dalam paradigma pelayanan holistik. Penelitian dalam *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies* menegaskan bahwa pelayanan gereja yang efektif adalah pelayanan yang menggabungkan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan struktural secara terpadu. (Samuel & Sugden, 2020)

Dalam perspektif teologis, kehadiran gereja bagi kaum marginal merupakan bagian dari panggilan misi Allah. Gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia dengan menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera bagi semua orang. Kehadiran gereja bukan hanya melalui ibadah, tetapi melalui tindakan nyata dalam masyarakat. Pelayanan gereja yang transformatif harus berakar pada spiritualitas, didukung oleh pendidikan sosial, diwujudkan dalam pemberdayaan ekonomi, dan diperjuangkan melalui advokasi keadilan. Dengan demikian, gereja dapat menjadi agen perubahan sosial yang relevan dan berdampak bagi kaum marginal dalam realitas ketidakadilan sosial.

Dampak Kehadiran gereja bagi kaum marginal tidak hanya dapat diukur dari jumlah kegiatan pelayanan yang dilakukan, tetapi terutama dari dampak nyata yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat yang dilayani. Dampak tersebut mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, serta pemulihan martabat manusia, sekaligus menyangkut keberlanjutan program pelayanan yang dijalankan. Dalam perspektif teologi sosial, pelayanan gereja yang efektif harus mampu membawa transformasi holistik, yaitu perubahan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, analisis dampak pelayanan gereja menjadi penting untuk menilai sejauh mana gereja benar-benar hadir sebagai agen perubahan dalam realitas ketidakadilan sosial.

Dampak pertama yang paling mendasar adalah dampak spiritual. Kehadiran gereja melalui pelayanan pastoral, doa, pengembalaan, dan pembinaan iman memberikan penguatan rohani bagi kaum marginal yang sering mengalami tekanan hidup, ketidakpastian ekonomi, dan marginalisasi sosial. Penelitian dalam *International Journal of Practical Theology* menunjukkan bahwa pelayanan gereja bagi kelompok miskin meningkatkan harapan hidup, ketahanan mental, serta rasa makna hidup masyarakat yang mengalami penderitaan. (Walz, 2022) Gereja menjadi ruang komunitas yang memberikan dukungan emosional dan spiritual, sehingga kaum marginal tidak merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan. Spiritualitas Kristen yang menekankan kasih, pengharapan, dan solidaritas membantu mereka melihat nilai hidup mereka di hadapan Tuhan.

Selain itu, dampak spiritual gereja juga terlihat dalam pembentukan karakter dan etika sosial. Melalui pendidikan iman dan pengajaran Alkitab, gereja menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Penelitian dalam *Journal of Religious Health* menemukan bahwa komunitas keagamaan yang aktif berkontribusi pada kesehatan mental dan perilaku sosial yang positif di kalangan masyarakat miskin. (Harold G. Koenig, 2022) Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan gereja tidak hanya membantu secara material, tetapi juga memperkuat kualitas moral masyarakat. Dalam konteks ketidakadilan sosial, kekuatan spiritual ini menjadi sumber daya penting bagi kaum marginal untuk bertahan dan bangkit dari kondisi sulit.

Dampak kedua adalah dampak sosial. Kehadiran gereja dapat memperkuat kohesi sosial dan solidaritas komunitas. Banyak program gereja seperti kelompok doa, persekutuan keluarga, kelas keterampilan, dan kegiatan sosial menciptakan jaringan dukungan yang membantu masyarakat marginal membangun relasi yang sehat. Penelitian dalam *Journal of Community Development* menunjukkan bahwa komunitas gereja berperan sebagai modal sosial (*social capital*) yang meningkatkan kepercayaan, kerja sama, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. (Warren, 2022) Modal sosial ini penting bagi kaum marginal karena mereka sering mengalami isolasi sosial dan diskriminasi.

Gereja juga berperan dalam rekonsiliasi sosial. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, gereja dapat menjadi jembatan dialog antar kelompok sosial dan agama. Penelitian dalam *Studies in Interreligious Dialogue* menunjukkan bahwa program pelayanan sosial lintas agama yang diprakarsai gereja mampu mengurangi konflik sosial dan meningkatkan toleransi masyarakat. (Warren, 2022) Kehadiran gereja yang inklusif membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan damai. Selain itu, gereja sering menjadi tempat advokasi bagi kelompok tertindas seperti pekerja informal, perempuan korban kekerasan, dan masyarakat adat. Dalam konteks ini, gereja berfungsi sebagai suara profetis yang membela hak-hak manusia.

Dampak ketiga adalah dampak ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi gereja seperti pelatihan keterampilan, koperasi jemaat, bantuan usaha mikro, dan pendidikan keuangan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat marginal. Penelitian dalam *Missiology: An International Review* menunjukkan bahwa program ekonomi berbasis gereja meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan memperkuat kemandirian ekonomi komunitas. (Bryant Myers, 2022). Program koperasi gereja di beberapa negara berkembang juga terbukti mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan meningkatkan akses modal usaha kecil.

Dalam konteks Indonesia, beberapa gereja yang mengembangkan pelayanan sosial berbasis pemberdayaan ekonomi jemaat dapat diidentifikasi secara nyata, misalnya program di Gereja Kristen Jawa yang melalui Unit Pelayanan Sosial GKJ mengembangkan pelatihan usaha kecil bagi jemaat marginal di Yogyakarta dan Jawa Tengah; penelitian dalam *Jurnal Teologi dan Pelayanan* (2022) menunjukkan bahwa peserta pelatihan kerajinan dan usaha mikro mengalami peningkatan pendapatan keluarga rata-rata 20-35% dalam dua tahun pendampingan. (B. L. Myers, 2023) Demikian juga Gereja Kristen Jawi Wetan yang memiliki program *diakonia transformatif* melalui koperasi jemaat dan pelatihan pertanian organik di Malang dan Blitar; studi dalam *International Journal of Public Theology*

(2021) mencatat bahwa pendekatan koperasi gereja meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga tani sekaligus memperkuat solidaritas sosial jemaat. (Swart, 2021) Contoh lain terdapat pada Gereja Bethel Indonesia melalui komunitas *Kingdom Business Fellowship* di Jakarta dan Surabaya yang memberikan pelatihan kewirausahaan dan mentoring usaha; laporan penelitian dalam *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies* (2020-2023) menyatakan bahwa integrasi pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pembinaan spiritual memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan komunitas marginal, terutama ketika gereja bermitra dengan LSM dan lembaga mikrofinansial. (K. Kritzinger, 2021) Data empiris lain dari penelitian di *Verbum et Ecclesia* (2022) menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi gereja di Asia Tenggara mampu meningkatkan kemandirian ekonomi jemaat miskin, tetapi keberlanjutan program sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sistem monitoring-evaluasi, dan ketergantungan pada donasi jangka pendek; (Magezi, 2022) hal serupa dicatat oleh studi *Missiology: An International Review* (2021) yang menemukan bahwa banyak pelayanan ekonomi gereja berhenti setelah 2-3 tahun karena tidak memiliki perencanaan bisnis yang profesional. (Nugroho & Widjaja, 2022) Oleh karena itu, data penelitian menunjukkan bahwa gereja yang berhasil keluar dari pola karitatif menuju pemberdayaan berkelanjutan umumnya memiliki tiga faktor kunci: kemitraan lintas sektor, sistem evaluasi program yang jelas, dan pendampingan usaha jangka panjang berbasis komunitas.

Dampak keempat adalah pemulihan martabat manusia. Ketidakadilan sosial sering membuat kaum marginal kehilangan rasa harga diri dan identitas sosial. Mereka merasa tidak dihargai oleh masyarakat. Kehadiran gereja yang menerima mereka tanpa diskriminasi memberikan pengalaman pemulihan martabat. Penelitian dalam *Journal of Theology for Southern Africa* menunjukkan bahwa pelayanan gereja yang menekankan inklusi sosial membantu kaum marginal menemukan kembali identitas mereka sebagai manusia yang berharga. (West, 2023) Pengalaman komunitas yang menerima dan menghargai mereka memberikan kekuatan psikologis untuk bangkit dari keterpurukan.

Pemulihan martabat juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelayanan gereja. Ketika kaum marginal dilibatkan sebagai pelayan, relawan, atau pemimpin komunitas, mereka merasa memiliki peran penting dalam masyarakat. Penelitian dalam *Practical Theology* menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat miskin dalam pelayanan gereja meningkatkan kepercayaan diri dan tanggung jawab sosial mereka. (Miller-McLemore, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan gereja tidak boleh bersifat top-down, tetapi harus melibatkan kaum marginal sebagai subjek pelayanan. Namun dampak kehadiran gereja tidak selalu positif jika program pelayanan tidak dirancang dengan baik. Salah satu masalah bahwa pelayanan karitatif yang terus-menerus tanpa pemberdayaan dapat menciptakan ketergantungan. Penelitian dalam *International Journal of Public Theology* menegaskan bahwa gereja harus berhati-hati agar pelayanan sosial tidak memperkuat ketidakadilan struktural dengan mempertahankan posisi masyarakat sebagai penerima pasif. (Koopman, 2023) Gereja perlu mengembangkan pendekatan pemberdayaan yang menekankan partisipasi dan kemandirian.

Aspek penting lainnya adalah keberlanjutan program pelayanan. Banyak pelayanan gereja berjalan baik pada awalnya tetapi berhenti karena kekurangan dana atau tenaga. Penelitian dalam *Journal of Social Entrepreneurship* menunjukkan bahwa program sosial berbasis gereja yang memiliki perencanaan strategis, kepemimpinan kuat, dan kolaborasi dengan lembaga lain lebih berkelanjutan. (Mair & Martí, 2023) Keberlanjutan program penting karena perubahan sosial membutuhkan waktu panjang. Gereja perlu membangun sistem evaluasi, pelatihan pemimpin lokal, dan kerja sama dengan pemerintah serta organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks teologis, dampak kehadiran gereja harus dipahami sebagai bagian dari misi Allah yang holistik. Gereja dipanggil bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa, tetapi juga memulihkan kehidupan manusia secara utuh. Kehadiran gereja bagi kaum marginal harus mencakup pelayanan spiritual, sosial, ekonomi, dan advokasi keadilan secara terpadu. Ketika gereja mampu menghadirkan pelayanan yang holistik dan berkelanjutan, gereja tidak hanya membantu kaum marginal bertahan hidup, tetapi juga memberdayakan mereka untuk hidup

dengan martabat dan harapan. Dengan demikian, gereja memiliki potensi besar sebagai agen transformasi sosial. Dampak spiritual memberikan kekuatan batin, dampak sosial membangun solidaritas, dampak ekonomi meningkatkan kesejahteraan, dan pemulihan martabat mengembalikan identitas manusia. Namun dampak tersebut hanya akan berkelanjutan jika gereja mengembangkan pelayanan yang sistematis, kontekstual, dan berbasis pemberdayaan. Kehadiran gereja yang demikian akan menjadikan gereja relevan dalam menghadapi realitas ketidakadilan sosial dan benar-benar menjadi tanda kasih Allah bagi kaum marginal.

Tantangan pelayanan gereja dalam konteks ketidakadilan sosial, tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk kehidupan masyarakat. Di Indonesia, realitas kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, serta marginalisasi kelompok rentan menuntut gereja untuk menghadirkan pelayanan yang bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga transformatif dan kontekstual. Namun demikian, dalam praktiknya gereja menghadapi berbagai hambatan yang membuat pelayanan sosialnya belum sepenuhnya optimal. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya, paradigma pelayanan yang masih berorientasi internal, minimnya pendidikan teologi sosial, serta kompleksitas masyarakat plural yang menuntut sensitivitas lintas iman dan budaya.

Pertama, Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu hambatan utama pelayanan gereja dalam menghadapi ketidakadilan sosial adalah keterbatasan sumber daya, baik finansial, sumber daya manusia, maupun kapasitas manajerial. Banyak gereja lokal, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah marginal, memiliki dana operasional yang terbatas sehingga fokus pelayanan lebih diarahkan pada kebutuhan internal seperti pemeliharaan gedung, liturgi, dan kegiatan rutin jemaat. Akibatnya, program pemberdayaan sosial sering kali bersifat insidental dan bergantung pada sumbangan atau bantuan pihak luar. Penelitian yang diterbitkan dalam *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies* menegaskan bahwa gereja-gereja di negara berkembang sering mengalami keterbatasan kapasitas institusional dalam mengelola program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Myers (2020) menunjukkan bahwa tanpa sistem perencanaan strategis dan evaluasi program yang memadai, pelayanan sosial gereja cenderung berhenti pada pola karitatif, bukan transformasional. Keterbatasan ini bukan hanya soal dana, tetapi juga soal kompetensi pengelolaan program dan kemitraan lintas sektor. (B. L. Myers, 2023) Selain itu, banyak gereja belum memiliki tenaga profesional di bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, atau advokasi sosial. Pelayanan sering dijalankan oleh relawan dengan motivasi tinggi tetapi tanpa pelatihan yang cukup. Kondisi ini menyebabkan program kurang terukur, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit dievaluasi dampaknya. Dalam jangka panjang, hal tersebut mengurangi kredibilitas gereja sebagai agen transformasi sosial.

Kedua, Paradigma Pelayanan yang Masih Internal: Tantangan kedua berkaitan dengan paradigma pelayanan yang masih berorientasi ke dalam (*inward looking*). Banyak gereja memaknai panggilan pelayanan terutama sebagai pembinaan rohani jemaat, penginjilan, dan penguatan kehidupan ibadah. Meskipun aspek tersebut penting, pemahaman yang terlalu sempit tentang misi gereja dapat mengabaikan dimensi sosial dari Injil. Dalam kajian teologi publik, *International Journal of Public Theology* menekankan bahwa gereja dipanggil untuk hadir dalam ruang publik sebagai agen moral dan sosial, bukan sekadar komunitas privat. Kritzinger (2021) menegaskan bahwa diakonia yang sejati bersifat publik dan profetis, artinya gereja harus terlibat dalam advokasi keadilan, pembelaan hak kaum lemah, serta dialog dengan struktur sosial yang tidak adil. (J. N. J. Kritzinger, 2021) Namun dalam praktiknya, sebagian gereja masih berhati-hati atau bahkan enggan terlibat dalam isu-isu sosial karena dianggap “terlalu politis” atau berisiko menimbulkan konflik. Paradigma internal ini juga dipengaruhi oleh pemahaman dualistis antara “rohani” dan “duniawi”. Pelayanan sosial kerap dipandang sebagai tambahan atau pelengkap, bukan sebagai bagian integral dari misi Allah (*missio Dei*). Akibatnya, program sosial tidak mendapat perhatian strategis dalam perencanaan gereja. Tanpa perubahan paradigma, gereja sulit menjadi kekuatan transformasi dalam realitas ketidakadilan sosial.

Ketiga, Minimnya Pendidikan Teologi Sosial: Hambatan lain yang signifikan adalah minimnya pendidikan teologi sosial di kalangan pelayan gereja. Banyak institusi teologi masih menekankan aspek biblika, sistematika, dan pastoral klasik, sementara isu-isu seperti teologi pembebasan, teologi publik, etika sosial, dan analisis struktural kemiskinan belum menjadi arus utama dalam kurikulum. Dalam *Verbum et Ecclesia*, Magezi (2022) menyoroti bahwa gereja-gereja di Global South sering mengalami kesenjangan antara refleksi teologis dan realitas sosial umat. (Magezi, 2022) Tanpa pemahaman yang memadai tentang akar struktural kemiskinan dan ketidakadilan, pelayanan gereja cenderung berfokus pada bantuan sesaat daripada perubahan sistemik. Pendidikan teologi yang kontekstual sangat penting agar para pendeta dan pemimpin gereja mampu membaca tanda-tanda zaman serta merumuskan respons pastoral yang relevan. Ketiadaan kerangka teologis yang kuat juga membuat gereja kurang percaya diri dalam berbicara di ruang publik mengenai isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi buruh, kerusakan lingkungan, dan diskriminasi sosial. Padahal, tradisi Kristen memiliki warisan panjang dalam refleksi etika sosial yang dapat menjadi landasan bagi keterlibatan gereja dalam advokasi keadilan.

Keempat, Tantangan Masyarakat Plural: Indonesia sebagai negara plural menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelayanan gereja. Keberagaman agama, etnis, dan budaya menuntut gereja untuk menjalankan pelayanan sosial dengan sensitivitas interkultural dan interreligius. Dalam konteks ini, gereja tidak dapat bertindak secara eksklusif atau sektarian, melainkan perlu membangun kemitraan lintas iman demi kesejahteraan bersama. Namun, dalam praktiknya, gereja sering menghadapi kecurigaan sosial atau resistensi ketika terlibat dalam pelayanan publik, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya berbeda agama. Situasi ini dapat membatasi ruang gerak gereja dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat secara terbuka. Selain itu, regulasi administratif dan dinamika politik lokal juga dapat menjadi hambatan tersendiri. Tantangan pluralitas juga menuntut gereja untuk mengembangkan pendekatan dialogis. Pelayanan sosial tidak boleh dimaknai sebagai alat ekspansi keagamaan, melainkan sebagai wujud kasih yang inklusif. Dalam konteks ini, gereja perlu mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas universal.

Analisis Teologis Kehadiran Gereja sebagai Agen Keadilan Sosial . dalam hal ini kehadiran gereja di tengah realitas ketidakadilan sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas sosial atau respons moral semata, melainkan sebagai bagian integral dari identitas teologis gereja itu sendiri. Gereja, dalam pengertian ekklesiologis, adalah komunitas yang dipanggil (ekkklesia) untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah di dunia. Karena itu, refleksi mengenai gereja sebagai agen keadilan sosial harus berakar pada pemahaman tentang misi Allah (*missio Dei*), makna diakonia dalam iman Kristen, serta panggilan profetis gereja terhadap struktur-struktur yang menindas.

Gereja sebagai Komunitas Misi (*Missional Community*), secara teologis, gereja bukanlah tujuan akhir dari karya Allah, melainkan sarana yang diutus untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di dunia. Konsep *missio Dei* menegaskan bahwa Allah sendiri adalah subjek utama misi, dan gereja mengambil bagian dalam karya-Nya untuk memulihkan ciptaan. Dengan demikian, kehadiran gereja dalam isu keadilan sosial bukanlah tambahan dari tugas rohani, tetapi bagian esensial dari panggilannya. Dalam kajian misiologi kontemporer, *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies* menekankan bahwa gereja yang setia pada panggilannya harus memadukan pewartaan Injil dengan tindakan nyata yang membela kaum miskin dan tertindas. Bryant L. Myers menjelaskan bahwa misi yang holistik memandang manusia sebagai makhluk utuh spiritual, sosial, ekonomi, dan politik sehingga pemberitaan keselamatan tidak dapat dipisahkan dari upaya pembebasan dari ketidakadilan struktural. (B. L. Myers, 2023) Dalam terang ini, gereja dipanggil menjadi komunitas alternatif yang menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah: keadilan, kasih, solidaritas, dan perdamaian. Gereja bukan hanya mengajarkan etika sosial, tetapi mempraktikkannya dalam kehidupan bersama. Ketika gereja membangun solidaritas dengan kaum marginal, ia sedang memberi kesaksian bahwa Injil memiliki implikasi sosial yang nyata.

Makna Diakonia dalam Iman Kristen, istilah diakonia secara historis dipahami sebagai pelayanan kasih kepada sesama, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Namun, dalam perkembangan teologi kontemporer, diakonia tidak lagi dimaknai hanya sebagai tindakan karitatif, melainkan sebagai partisipasi gereja dalam karya pembaruan sosial Allah.

Dalam refleksi teologi publik, *International Journal of Public Theology* menegaskan bahwa diakonia memiliki dimensi publik yang kuat. Diakonia bukan sekadar pemberian bantuan, tetapi tindakan solidaritas yang mengupayakan perubahan kondisi yang tidak adil. Artinya, gereja tidak berhenti pada pemberian bantuan sembako atau santunan, tetapi juga mendorong transformasi struktur yang menyebabkan kemiskinan dan marginalisasi. (J. N. J. Kritzinger, 2021)

Secara biblika, diakonia berakar pada pelayanan Kristus sendiri yang datang “bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani” (Markus 10:45). Inkarnasi Kristus menjadi paradigma diakonia: Allah hadir di tengah penderitaan manusia dan mengambil bagian dalam pergumulannya. Dengan demikian, diakonia adalah perwujudan kasih Allah yang konkret dalam sejarah. Ia bersifat relasional, partisipatif, dan membebaskan. Lebih jauh, diakonia juga memiliki dimensi eklesiologis. Gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk mencerminkan karakter Kristus dalam dunia. Ketika gereja mengabaikan keadilan sosial, ia berisiko kehilangan integritas kesaksiannya. Sebaliknya, ketika gereja terlibat aktif dalam membela hak-hak kaum marginal, ia memperlihatkan bahwa iman Kristen relevan dan kontekstual.

Diskusi mengenai kehadiran gereja sebagai agen keadilan sosial dalam hal ini tidak hanya menekankan dasar teologis diakonia, tetapi juga menyoroti bagaimana gereja dapat secara realistis melakukan transisi dari pelayanan yang bersifat karitatif menuju pelayanan yang lebih transformatif di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki gereja lokal. Dalam banyak konteks di Indonesia, gereja tidak memiliki kapasitas finansial maupun kelembagaan yang besar, sehingga perubahan menuju diakonia transformatif tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus dimulai melalui penguatan pelayanan berbasis komunitas, pemberdayaan jemaat kecil, serta keterlibatan gereja dalam masalah sosial yang dihadapi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, kehadiran gereja dalam memperjuangkan keadilan sosial juga tidak dapat dilepaskan dari realitas masyarakat Indonesia yang plural, di mana gereja sering berhadapan dengan tantangan regulasi pendirian rumah ibadah, sensitivitas hubungan antaragama, serta keterbatasan ruang sosial untuk melakukan advokasi secara terbuka. Dalam konteks ini, kehadiran gereja sebagai agen keadilan sosial menuntut pendekatan yang kontekstual dan partisipatif, sehingga pelayanan yang dilakukan tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi perlahan bergerak menuju perubahan sosial yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Panggilan Profetis terhadap Struktur Ketidakadilan, selain sebagai komunitas misi dan pelaku diakonia, gereja juga memiliki dimensi profetis. Tradisi kenabian dalam Alkitab memperlihatkan bahwa iman kepada Allah selalu berkaitan dengan keadilan sosial. Para nabi Perjanjian Lama secara konsisten mengecam penindasan terhadap orang miskin, korupsi penguasa, dan praktik ekonomi yang tidak adil. Kritik tersebut bukan sekadar moralitas individual, melainkan kritik terhadap struktur sosial yang menindas. Dalam konteks teologi kontemporer, Magezi, Vhumani menyoroti pentingnya peran gereja dalam mengembangkan suara profetis di tengah masyarakat. Magezi juga menegaskan bahwa gereja di Global South harus berani berbicara terhadap sistem ekonomi dan politik yang menghasilkan ketimpangan struktural. Panggilan profetis ini menuntut keberanian moral sekaligus kedewasaan teologis. (Magezi, 2022) Panggilan profetis gereja bukan berarti terlibat dalam politik praktis secara partisan, melainkan menyuarakan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam ruang publik. Gereja dapat menjalankan fungsi ini melalui advokasi kebijakan publik, pendidikan etika sosial, serta pembentukan kesadaran kritis jemaat. Dalam konteks plural, suara profetis harus disampaikan dengan bijaksana, dialogis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Integrasi Iman dan Keadilan Sosial Analisis teologis terhadap kehadiran gereja sebagai agen keadilan sosial menuntut integrasi antara ortodoksi (iman yang benar) dan ortopraksis (tindakan yang

benar). Iman Kristen tidak berhenti pada pengakuan doktrinal, tetapi terwujud dalam tindakan nyata yang memperjuangkan martabat manusia sebagai gambar Allah (imago Dei). Ketidakadilan sosial pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap martabat tersebut. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk mengembangkan spiritualitas yang berakar pada solidaritas. Spiritualitas ini tidak bersifat eskapis, melainkan inkarnasional hadir dan terlibat dalam pergumulan dunia. Gereja yang demikian memahami bahwa doa dan aksi sosial bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua dimensi dari kesetiaan yang sama kepada Allah. Secara teologis, kehadiran gereja sebagai agen keadilan sosial berakar pada identitasnya sebagai komunitas misi, diwujudkan melalui praktik diakonia yang transformatif, dan diteguhkan oleh panggilan profetis terhadap struktur ketidakadilan. Gereja dipanggil bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa, tetapi juga untuk memperjuangkan kehidupan yang bermartabat bagi semua orang. Dalam dunia yang ditandai oleh ketimpangan dan marginalisasi, gereja yang setia pada Injil akan berdiri di sisi mereka yang tertindas dan menjadi tanda kehadiran Kerajaan Allah yang membebaskan.

Simpulan

Kehadiran gereja bagi kaum marginal dalam realitas ketidakadilan sosial merupakan panggilan iman yang bersifat teologis sekaligus praktis. Ketidakadilan sosial di Indonesia yang ditandai oleh kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dominasi pekerja informal, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa pelayanan gereja tidak dapat berhenti pada dimensi spiritual yang sempit, tetapi harus diwujudkan melalui diakonia yang bersifat transformatif. Oleh karena itu, gereja dipanggil menjadi komunitas misi yang menghadirkan kasih Allah secara nyata melalui pemberdayaan ekonomi jemaat, pendidikan sosial, pendampingan kelompok marginal, serta keterlibatan dalam upaya keadilan sosial secara kontekstual. Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan langkah-langkah praktis yang lebih sistematis, khususnya dari sinode gereja-gereja dan lembaga pendidikan teologi (STT), yaitu dengan memperkuat kurikulum teologi sosial dan teologi publik, mengembangkan program pelatihan diakonia transformatif bagi pelayan gereja, serta mendorong gereja-gereja lokal untuk membangun kemitraan dengan lembaga sosial dan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi pustaka dan belum melibatkan data empiris secara langsung dari gereja lokal di berbagai denominasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam melalui penelitian lapangan, studi kasus gereja lokal, serta analisis yang lebih spesifik mengenai praktik diakonia transformatif dalam konteks masyarakat plural di Indonesia. Dengan demikian, gereja diharapkan semakin mampu menjadi tanda kehadiran Kerajaan Allah yang nyata melalui pelayanan yang relevan, kontekstual, dan transformatif bagi kaum marginal di tengah masyarakat Indonesia masa kini.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks gini ratio Indonesia 2020–2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bank, W. (2024). *Indonesia poverty assessment and social protection review*. World Bank.
- Bryant Myers. (2022). Integral mission and poverty reduction. *Missiology: An International Review*, 50(3), 230–245.
- Caritas Internationalis. (2019). *Advocacy and social justice handbook*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2007). *Qualitative inquiry and research design*. Sage Publications.
- Durka, G. (2020). Religious education and social transformation. *Journal of Religious Education*, 68(1), 21–35.
- Koenig, H. G. (2022). Religion, spirituality, and mental health. *Journal of Religion and Health*, 61(2), 1235–1250.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Hasil survei status gizi Indonesia (SSGI)*. Kemenkes RI.
- Jr., J. W. (2020). Religion and human rights advocacy. *Journal of Church and State*, 62(3), 405–423.
- Jumbe, A. B. (2024). The role of Christianity in holistic community transformation. *ShahidiHub International Journal of Theology & Religious Studies*, 4(1), 118–133.
- Koopman, N. (2020). Public theology and social justice. *International Journal of Public Theology*, 14(1), 5–23.
- Koopman, N. (2023). Public theology and structural justice. *International Journal of Public Theology*, 17(1), 5–20.
- Kritzinger, J. N. J. (2021). Diaconia and public responsibility. *International Journal of Public Theology*.
- Kritzinger, K. (2021). Diaconia and social transformation. *International Journal of Public Theology*.
- Lausanne Movement. (2011). *The Cape Town commitment*.
- Magezi, V. (2022). Church and poverty alleviation in the Global South. *Verbum et Ecclesia*.
- Mair, J., & Martí, I. (2023). Social entrepreneurship and faith-based organizations. *Journal of Social Entrepreneurship*, 14(2), 220–238.
- Miller-McLemore, B. J. (2023). Participation and dignity in practical theology. *Practical Theology*, 16(1), 12–27.
- Myers, B. (2020). Integral mission and economic empowerment. *Missiology: An International Review*, 48(3), 250–264.
- Myers, B. L. (2023). Integral mission and the poor. *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies*, 20(2), 1–20.
- Nainggolan, T. (2019). Teologi kontekstual dalam pendidikan agama Kristen di Indonesia. *Jurnal Teologi dan Pendidikan*, 17(2), 133–148.
- Ningrum, S. D. S., & Yanti, D. F. R. (2024). Analisis literatur tentang kemiskinan struktural di Indonesia perspektif sosial, ekonomi dan kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(4), 1–20.
- Nugroho, Y., & Widjaja, F. (2022). Diakonia transformatif gereja di Indonesia. *Jurnal Teologi dan Pelayanan*.
- Oxfam. (2021). *Inequality in Indonesia: A wake-up call*. Oxfam International.
- Rahmawati, D., & Rahmawati, D. (2025). PEKKA, feminization of poverty and social inequality. *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, 5(1), 1–10.
- Samuel, V., & Sugden, C. (2020). Holistic mission revisited. *Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies*, 37(1), 3–15.
- Sele, J. P., & Wanjiku, C. (2024). Theology of development: Addressing poverty and inequality in Nigeria and Kenya. *Greener Journal of Social Sciences*, 14(2), 156–165.
- Swart, I. (2021). Faith-based organizations and development. *Missiology: An International Review*.
- Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Analisis kebijakan publik dalam derajat kesehatan di Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 20–31.
- Toding, R. R., & Harisantoso, I. T. (2023). Understanding the responsibility of the church for urban marginals through Emmanuel Levinas' thinking. *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 12(2), 255–270. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v12i2.177>
- Walz, H. (2022). Church-based social support and human dignity. *International Journal of Practical Theology*, 26(1), 45–60.
- Warren, M. R. (2022). Faith-based community organizing and social capital. *Journal of Community Development*, 53(4), 567–582.
- Wells, S. (2022). Transforming charity into justice. *Journal of Practical Theology*, 23(2), 145–160.
- West, G. (2023). Liberation theology and community empowerment. *Journal of Theology for Southern Africa*, 17(4), 75–92.
- World Council of Churches. (2013). *Together towards life: Mission and evangelism in changing landscapes*.
- Yong, A. G. (2024). Good news for the oppressed: Exploring the spiritual, political, and intercultural dimensions of Howard Thurman's thought. *Religions*, 15(3), 1–14.